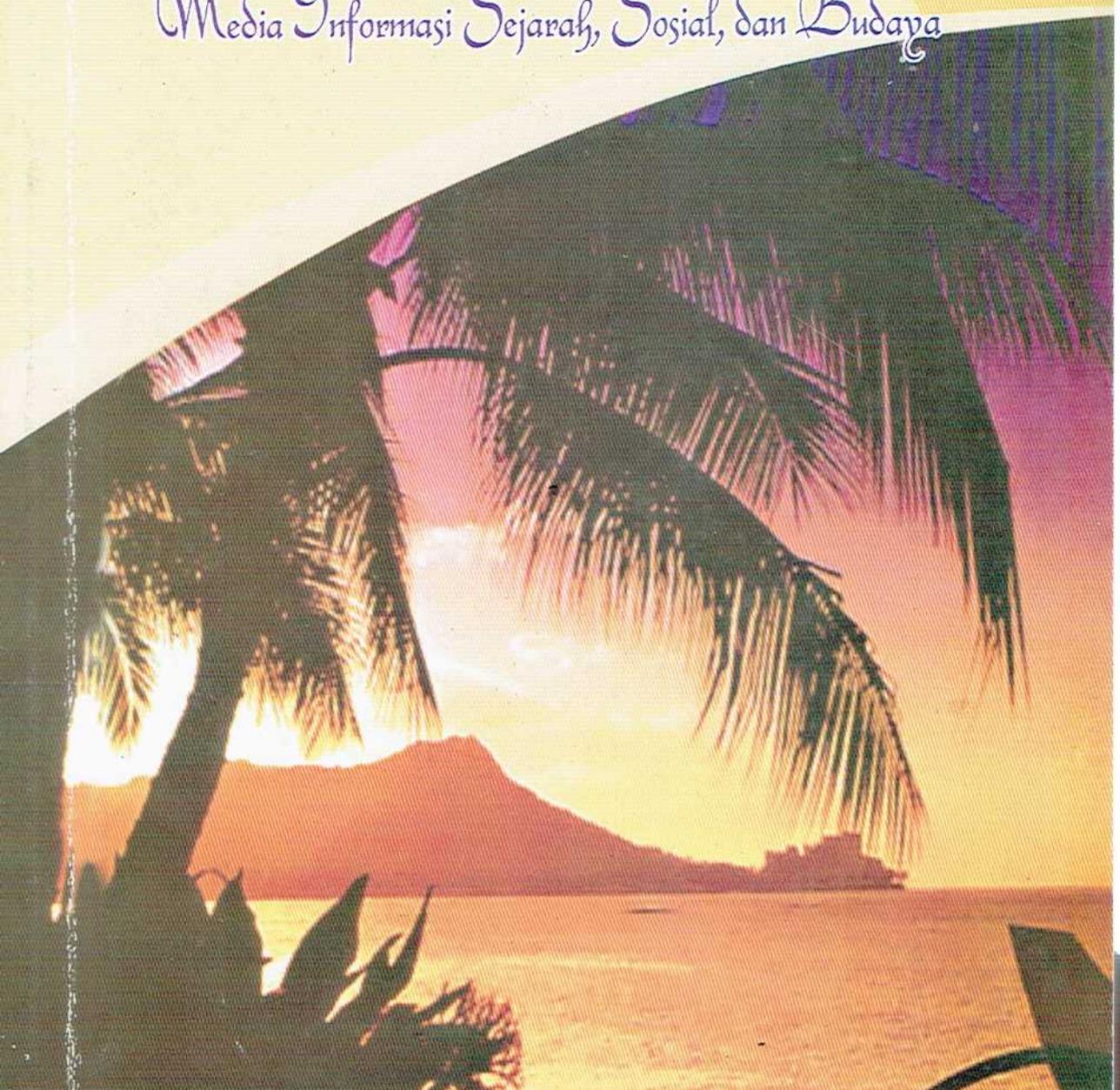


Akreditasi : 32 /Akred-LIPI/P2MBI/04/2011

Jnana Budaya

Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya



Jnana Budaya
Media Informasi Sejarah, Sosial dan Budaya

Vol. 16

No. 1

Hal. 1 - 160

Denpasar
Pebruari 2011

ISSN 1410-5195

JNANA BUDAYA
VOLUME 16 NOMER 1 BULAN FEBRUARI TAHUN 2011

No. Akreditasi : 32/Akred-LIPI/P2MBI/04/2011

Jnana Budaya merupakan seri penerbitan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian Budpar. Diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun. Jnana Budaya merupakan sebuah wadah untuk memberikan ruang dalam menyampaikan gagasan atau pun bersifat informasi berkaitan dengan bidang sejarah, sosial dan budaya. Fokus dari jurnal Jnana Budaya merupakan hasil pemikiran yang original dan aktual baik dalam tataran konsep ataupun dalam wujud yang sifatnya praktisi. Kata "Jnana" berasal dari Bahasa Jawa Kuna yang berarti pengetahuan. Sedangkan "budaya" merupakan konstruksi dari pola kehidupan masyarakat. Secara harfiah Jnana Budaya berarti pengetahuan tentang kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat.

- Ketua Dewan Redaksi : Drs. I Wayan Rupa, M.Si (Agama dan Kebudayaan)
- Dewan Penyunting : Prof. Dr. I Made Suastika, SU (Kajian Budaya)
Prof. Dr. I Nengah Sudipa, MA. (Sosiolinguistik)
Prof. Dr.Emiliana Mariyah, M.S. (Antropologi)
Dr. I Gede Mudana, M.Si. (Kajian Budaya)
Ferry Sadikin, ST., M.E. (Bahasa Inggris)
- Mitra Bestari : Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA. (Ilmu Sejarah)
Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, M.Si. (Teologi)
- Sekretaris Dewan Redaksi : I Gusti Ngurah Jayanti, S.Sos.,M.Si. (Antropologi)
- Redaksi Pelaksana : I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si (Antropologi)
Dra. I Gst. Ayu Armini (Bahasa Indonesia)
Drs. I Made Satyananda (Bahasa Indonesia)
Nuryahman, S.S (Ilmu Sejarah)
- Desai Cover : Hartono, S.S., I Wayan Suca Sumadi, SH.
- Distributor : I Made Sedana, BA, I Kadek Dwikayana
- Diterbitkan Oleh : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Bali, NTB dan NTT Tahun anggaran 2011
- Dicetak : PT. Percetakan Bali
Anggota IKAPI
Jl. Gajah Mada I/1 Denpasar, Telp. (0361) 234723
- Alamat Redaksi : Kantor : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali,
NTB dan NTT, Jalan Raya Dalung-Abian Base No. 107.
Faks . (0361) 439547 / Tlp. (0361) 439546.
Website : www.bpsntbali.com .
E-mail : info@bpsntbali.com, Ngurah_jayen@yahoo.com

Jnana Budaya

Media Informasi Sejarah, Sosial dan Budaya

DAFTAR ISI

Eksistensi Kelompok Usaha Jukung di Kawasan Pariwisata Nusa Dua Bali <i>Luh Nyoman Tri Ariani dan Ni Desak Made Santi Dwiyanthi</i>	1 - 12
Pelestarian Warisan Budaya dan Pariwisata di Bali <i>I Made Dharma Suteja</i>	13 - 24
Potensi Konflik Sara di Indonesia <i>Hartono</i>	25 - 34
Tenun Tradisional Subahnala <i>I Made Satyananda</i>	35 - 45
Arsitektur Tradisional Rumah Adat Sumba di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat <i>I Gusti Ayu Armini dan A.A. Rai Geria</i>	47 - 62
Kajian Nilai Ceritera Sakuntala <i>I Ketut Sudharma Putra</i>	63 - 72
Sekilas Tentang Naskah Kuno Megantaka <i>I Made Sumerta</i>	73 - 82
Pengokohan Jati Diri dan Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Lawatan Sejarah Praya - Taliwang <i>I Made Purna</i>	83 - 90

Strategi Penguatan Pondasi Dasar dalam Upaya Penguatan Jati Diri Masyarakat Bali <i>I Wayan Suca Sumadi</i>	91 - 100
Nilai - Nilai Pancasila dalam Pemahaman Multikulturalisme di Indonesia <i>I Gusti Ngurah Jayanti</i>	101 - 110
Sirnanya Perdagangan Kayu Cendana di Pulau Timor Sebuah Kajian Sosial Ekonomi <i>I Putu Kamasan Sanjaya</i>	111 - 121
Syahwat Kuasa dan Wajah Janus Agama <i>I Wayan Budi Utama</i>	123 - 133
Sabu Rajjua dalam Konteks Pemekaran Wilayah <i>Riana Dyah Prawitasari</i>	135 - 142
“Laskar Pelangi” dari Novel ke Film ke Televisi <i>I Made Suastika, Nyoman Kutha Ratna, I Gede Mudana, I Nyoman Suaka</i>	143 - 160
Lembar Abstrak	i - viii
Indeks Subjek.....	ix - xiii
Indeks Penulis.....	xiv - xiv
Ucapan Terima Kasih	xv - xv

SYAHWAT KUASA DAN WAJAH JANUS AGAMA

I Wayan Budi Utama
Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Naskah diterima, 4 Oktober 2010, diterima setelah perbaikan 9 November 2010
disetujui untuk dicetak, 5 Januari 2011

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba menggali secara teoretis akar persoalan terjadinya konflik-konflik agama yang belakangan ini marak terjadi dalam masyarakat. Munculnya konflik-konflik agama rupanya disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan teks agama, serta penggunaan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan sehingga menyebabkan munculnya wajah janus agama.

Kata kunci : kekuasaan, konflik agama

ABSTRACT

This writing attempts to explore theoretically the roots of problem of religion conflicts lately rife in society. The emergence of religious conflicts seem to be caused by errors in interpreting religious texts, as well as the use of religion as an instrument of power legitimating, therefore causing the emergence of Janus face of religion

Key words: power, religious conflict

A. PENDAHULUAN

Suatu keniscayaan, mungkin Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang paling majemuk dari segi kultural dan etnisnya. Hildred Geertz (dalam Ismail, 1999:2) menyatakan keragaman masyarakat Indonesia sebagai berikut.

"Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing mempunyai identitas kultural sendiri, dan lebih dari 250 jenis bahasa dipakai....hampir semua agama dunia diwakili selain agama asli yang banyak sekali "

Pernyataan Geertz di atas hendak menunjukkan betapa beragamnya etnis, bahasa, dan agama asli nusantara, yang pada satu sisi memang dapat menjadi

modal bangsa, tetapi juga dapat menjadi acaman bagi kesatuan bangsa. Selain itu, kutipan ini jelas menunjukkan bahwa selain agama-agama besar sebagaimana diistilahkan dengan agama dunia (Islam, Kristen, Hindu, Budha), Geertz juga menemukan dan mengakui adanya agama-agama lokal yang tersebar di wilayah Indonesia. Hal ini adalah sebuah karunia, namun tidak tertutup kemungkinan akan menjadi bencana ketika sistem regulasi yang diterapkan oleh negara dianggap kurang pas oleh para pemeluk agama. Mengingat bahwa persoalan-persoalan agama, etnik, ras, suku, dan agama merupakan hal yang sangat sensitif karena akan selalu melibatkan emosi dari kelompok masing-masing. Begitulah keragaman itu dapat

menjadi kekuatan sekaligus kelemahan yang sangat tergantung pada kekuasaan negara atau sistem politik sebuah negara dalam berbagai bentuk regulasinya.

Saerosi (2004:9) menyatakan, baik secara teoretis maupun praktis pilihan sistem politik suatu negara secara signifikan berimplikasi pada eksistensi suatu agama, kehidupan umat beragama, pola pergumulan "kemajemukan" antarpemeluk agama, pola hubungan pemeluk agama mayoritas dan minoritas, serta pola hubungan antara kelompok keyakinan yang dominan terhadap kelompok keyakinan minoritas yang ada di dalamnya. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa relasi antara sistem politik suatu negara sangat signifikan pengaruhnya terhadap kehidupan keagamaan di suatu negara. Di panggung dunia dikenal dua sistem politik yang secara dikotomis menyajikan pola berbeda dalam melihat relasi antara negara agama. *Pertama*, sistem politik yang menganut pola hubungan integratif antara negara dan agama, sebagaimana dianut oleh sebagian besar pemikir politik Islam. Produk pemikiran ini menghasilkan bentuk negara agama. *Kedua*, sistem politik yang memisahkan antara negara dan agama, sebagaimana direpresentasikan oleh pemikiran Barat modern yang mengarah pada bentuk negara sekuler.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, namun bukan berarti negara agama. Regulasi negara dalam bidang agama dimaksudkan hanya sebagai wasit dalam permainan agar para pemeluk agama bermain sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Negara perlu mengatur sistem politik yang terkait

dengan masalah agama mengingat bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Effendy (2001:7; Yewangoe, 2009:33) bahwa agama, baik melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya ikut mempengaruhi, bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta kebijakan publik. Regulasi negara dalam bidang agama khususnya dalam negara kesatuan Indonesia menjadi sangat penting artinya mengingat bahwa semua misi agama, baik agama langit maupun agama bumi, agar dapat berkembang luas, pasti membutuhkan kekuatan (*power*) yang mampu memberikan perlindungan dan pengikut setia yang menyebarkan ajarannya, membangun tatanan keagamaan dan politik (Aziz, 2000:19). Dalam hal inilah netralitas negara sebagai pengatur alur informasi dan komunikasi lintas agama menjadi sangat penting artinya guna mencegah terjadinya konflik-konflik yang mungkin terjadi mengingat bahwa masing-masing agama dengan misi sucinya selalu berusaha mengembangkan jumlah pengikutnya.

Kekerasan atas nama agama muncul di beberapa daerah di Indonesia. Sebutlah beberapa kejadian seperti di Ambon, Poso, dan terakhir di Jawa Barat yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban. Kekerasan karena perbedaan keyakinan sebenarnya merupakan penistaan terhadap martabat manusia yang oleh Sang Pencipta telah diberikan kemampuan berpikir dan berkeyakinan. Tentu muncul berbagai pertanyaan yang selalu tidak mudah untuk dijawab. Mengapakah sentimen keagamaan belakangan ini begitu mencuat kepermukaan, adakah ini pertanda semakin melemahnya ideologi nasional yang berbanding terbalik dengan euforia otonomi daerah?

B. PEMBAHASAN

1. Benih - Benih Konflik Agama Prediksi dalam mitologi.

Beberapa tahun sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tahun 1938, seorang sastrawan Bali Ida Pedanda Made Sidemen dari Geria Delod Pasar, Intaran, Sanur melalui karyanya Siwagama telah memprediksi bahwa akan terjadi konflik-konflik agama dalam masyarakat. Hal ini secara tersirat digambarkan dalam kisah prabhu Candrabherawa. Ringkasan ceritanya adalah sebagai berikut. Dikisahkan bahwa raja Hastina menugaskan kepada adik-adiknya Catur Pandawa untuk melakukan pemantauan pelaksanaan ajaran agama terhadap raja-raja bawahan. Ringkas cerita akhirnya sampailah Werkodara alias Bhima di sebuah kerajaan yang melaksanakan sistem keagamaan berbeda dengan agama *mainstream* yang diterapkan oleh raja Hastina. Di pusat kerajaan Hastina melaksanakan ajaran *Karmasanyasa* (lebih menekankan pada ritual dan kerja keras sebagai bentuk pemujaan pada Tuhan) sementara pada kerajaan Prabhu Candrabherawa lebih pada *Jnanasanyasa* (lebih menekankan pada aspek spiritualitas dalam pemujaan pada Tuhan) Bhima kemudian mendatangi raja Candrabherawa, meminta penjelasan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan agama yang diterapkan di wilayahnya, berbeda dengan apa yang digariskan oleh raja Hastina. Dialogpun terjadi antara Bhima dengan Candrabherawa. Prabhu Candrabherawa tetap dalam pendiriannya tidak akan merubah ajaran agama yang dilaksanakan di wilayahnya, meskipun mendapat ancaman dari Bhima. Karena

tiada kata sepakat akhirnya Bhima melaporkan kejadian tersebut kepada raja Hastina.

Ringkas cerita, akhirnya raja Hastina dan Catur Pendawa didamping oleh Prabhu Kresna menyerang kerajaan Prabhu Candrabherawa. Terjadilah peperangan antara kedua kerajaan tersebut, dan kekalahan ada di pihak Prabhu Candrabherawa. Raja Candrabherawa kemudian menyerahkan puterinya untuk dikawini oleh raja Hastina (Sura,dkk.,2002). Jika dicermati cuplikan kisah tersebut di atas paling tidak terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji dalam konflik agama yaitu sebagai berikut. *Pertama*, adanya kekuasaan yang cenderung memaksakan keinginannya; *kedua*, cerita dimaksud paling tidak menunjukkan adanya kekerasan agama dari agama *mainstream* terhadap agama-agama lain.

Cerita di atas bila dikaitkan dengan pandangan Foucoult memang sangat relevan. Dia menyatakan bahwa agama tidak lepas dari hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Agama sebagai pengetahuan merupakan cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subjek lain tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari pihak tertentu. Menurut Foucoult bahwa strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana agama, kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan tentang wahyu. Kebenaran ternyata merupakan tempat berlangsungnya kekuasaan, dan ini juga menjadi tempat pembentukan pengetahuan. Lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat adalah agama. Lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner

dengan tujuan membentuk identitas. Agama dalam perannya membentuk identitas membantu pemeluknya merasakan kepemilikan pada kelompok sosial tertentu (Haryatmoko, 2010).

Sejalan dengan Haryatmoko, Foucault juga menyatakan bahwa terdapat relasi yang kuat antara kekuasaan dan pengetahuan. Foucault berusaha menjelaskan bahwa kekuasaan dikendalikan oleh wacana dan bagaimana wacana itu selalu berakar dalam kekuasaan, kekuasaan menghasilkan pengetahuan, kekuasaan dan pengetahuan secara langsung saling mempengaruhi, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa ada konstitusi korelatif dari bidang pengetahuannya, atau bahwa suatu pengetahuan tidak akan menuntut dan membentuk hubungan kekuasaan pada waktu yang sama. Dengan kata lain Foucault berpandangan bahwa tidak ada pengetahuan abadi yang berlaku di segala zaman.

Foucault sebenarnya telah mengadopsi pemikiran Nietzsche (Best, 2003: 38) tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, tetapi hubungan itu lebih banyak dianalisisnya secara sosiologis. Dalam genealogis kekuasaan, Foucault membahas bagaimana orang mengatur diri sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Di antaranya, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan mengangkat orang menjadi subjek dan kemudian memerintah subjek dengan pengetahuan. Foucault juga memberi perhatian cukup besar pada teknik, teknologi yang berasal dari pengetahuan (terutama yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah), dan memperhatikan cara teknologi digunakan oleh berbagai instansi untuk memaksakan kekuasaan

terhadap manusia. Meski ia melihat kaitan antara pengetahuan dan kekuasaan, namun ia yakin bahwa pengetahuan dan kekuasaan selalu bersaing; antara keduanya selalu terjadi resistensi (Ritzer, 2003: 115; Ritzer, 2005: 610).

Galtung (2002) juga menyampaikan bahwa agama dan ideologi secara potensial menjadi pemicu terjadinya kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Menurut Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di 'dalam', dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualisasikan, yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya.

Secara sosiologis merujuk pada pandangan Max Weber, kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. Kesempatan merupakan satu konsep yang sangat inti dalam definisi Weber. Kesempatan dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan bagi seseorang. Sementara itu menurut Amitai Etzioni kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi. Menurut Etzioni, aset/milik/modal yang ada pada seseorang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk menunjang kekuasaan

(Santoso,2002). Sejalan dengan pandangan Etzioni, menurut Bourdieu, agen saling 'bertarung' memperebutkan posisi atau mempertahankan kekuasaan dengan mempengaruhi paling tidak empat modal yaitu ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik (Rey, 2007).

Dari paparan di atas kiranya dapat diketahui bahwa konflik-konflik agama bisa muncul dari adanya kemampuan para agen pemegang kekuasaan untuk memainkan aset-aset yang dimiliki (termasuk agama) untuk menekan oposisi agar tunduk pada kemauannya. Bahaya yang ditimbulkan akibat kolaborasi agama dan kekuasaan dapat mengancam kehidupan manusia. Hal ini diungkapkan Mulkham (2007) sebagai berikut.

"Kekuasaan politik yang diberi legitimasi keagamaan, atau sebaliknya, dapat membuat keduanya eksklusif, dan keduanya dapat penuh kekerasan. Kekuasaan menjadi demikian sering mementingkan diri sendiri dengan dalih untuk Tuhan. Hegemoni semua aspek kehidupan menjadi sistematis dan sakral ketika keagamaan mulai berkolaborasi dengan kekuasaan dan sebaliknya. Keagamaan dan kekuasaan atas nama Tuhan menjadi serba mutlak dan benar tanpa tanding".

2. Wajah Janus Agama

Robertson (1986) menyatakan bahwa salah satu gejala intelektual yang paling menarik pada abad ke-20 adalah besarnya minat untuk mempelajari agama, dan pada suatu ketika terdapat kesesuaian pendapat secara luas bahwa kepercayaan agama sebagaimana difahami secara tradisional, secara mencolok lebih

menekankan makna intrinsiknya bagi sebagian besar warga masyarakat modern. Memperhatikan perkembangan studi agama-agama dewasa ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Pendekatan yang *pertama* bersifat teofosentris, yaitu menelaah agama sebagai seperangkat ajaran-ajaran dari Tuhan yang tercantum dalam kitab-kitab suci. Agama dipandang sebagai seperangkat keyakinan yang sakral dan mutlak, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam lingkungan di mana ia berada. Studi agama seperti ini bersifat sangat normatif atau dengan kata lain menggunakan pendekatan yang bersifat tekstual. Pada dimensi ini agama diletakkan sebagai standar moral dan acuan sopan santun tingkah laku sosial budaya. Agama dalam hal ini dipandang sebagai pusat-pusat orientasi nilai yang memiliki kebenaran analistis-ideologis.

Sementara itu, pendekatan *kedua*, agama ditelaah sebagai kenyataan yang bersifat sosio-historis yang tumbuh dan berkembang dalam pengalaman perilaku para pemeluknya. Dalam pendekatan ini agama lebih dimaknai dalam konteks kehidupan dan kebudayaan para pemeluknya. Pendekatan ini lebih bersifat kontekstual atau lebih bersifat empirik. Di dalam praktik ini kebenaran agama secara tekstual mendapatkan nilai tertingginya karena kebenaran agama lebih ditekankan pada praktiknya dan bukan hanya dalam kebenaran normatifnya. Harus diakui bahwa tidak setiap kebenaran secara normatif selalu sama dengan kebenaran agama secara praksis dalam kehidupan sosial karena pada kenyataannya tidak ada ide yang eksis dalam realitas

empiris. Akan tetapi setidaknya-tidaknya agama memiliki dua dimensi penting bagi manusia, yakni menata pemikiran dan sikap manusia dan juga menata tindakannya dalam berbagai aspeknya. Secara tekstual agama menata pemikiran manusia sehingga secara kontekstual ia tidak tersesat dalam dunia pengalaman yang sarat dengan kontradiksi nilai dan norma. Perpaduan antara agama sebagai kebenaran tekstual dan kontekstual merupakan ideologi tertinggi dari sebuah cita-cita keberagamaan dalam setiap masyarakat manusia.

Walaupun demikian, dalam dunia yang semakin sempit oleh karena pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, baik agama maupun masyarakat telah mengalami perubahan. Fungsi agama dalam masyarakat juga mengalami pergeseran-pergeseran yang semakin meyakinkan semakin jauh dari fungsinya semula karena kehadirannya tidak lagi dimonopoli oleh identitas yang bersifat kewilayahan. Identitas tidak lagi dapat ditemukan dalam batas-batas budaya masyarakat setempat karena arus barang dan orang semakin dinamis. Dalam konteks pergeseran semacam ini simbol kebudayaan akhirnya, bukan lagi sebagai pengarah yang menentukan dalam suatu masyarakat yang dipatuhi dan memiliki daya paksa, tetapi menjadi alat politik bagi perjuangan kepentingan para pihak, baik individual, kelompok maupun institusi. Simbol-simbol agama misalnya, tidak hanya menjadi penunjuk arah dari suatu praktik yang berhubungan dengan religiusitas, tetapi juga bagi sebagian orang, kelompok atau institusi menjadi alat bagi legitimasi atas keberadaan dan kepentingan. Agama berfungsi mengesahkan keberadaan

dan tindakan-tindakan yang bisa terjadi menyimpang dari substansi ajaran karena citra telah mewakili suatu realitas keagamaan itu sendiri. Agama dipraktikkan sebagai bagian dari pengendalian sosial dan identifikasi diri untuk pemosisian individu, kelompok, dan institusi dalam serangkaian transaksi sosial yang dinamis dan kontekstual. Simbol-simbol budaya telah menjadi alat bagi penegasan autentisitas kelompok yang keberadaannya menjadi bagian dari sistem sosial global dengan pertentangan nilai yang semakin tajam (Abdullah, 2006).

Sejalan dengan pandangan di atas, Cassanova (2003) mengasumsikan bahwa dalam skala global pada dekade tahun 1980-an, agama menunjukkan wajah Janusnya, sebagai pembawa identitas-identitas yang tidak hanya eksklusif, partikularis, dan identitas-identitas primordial, namun juga inklusif, universal dan transenden. Kebangkitan agama menandai kemunculan fundamentalisme serta perannya dalam mencegah penindasan dan munculnya 'ketidakberdayaan'. Kondisi paradoks agama ini telah memunculkan berbagai konflik yang berbau agama. Artinya, agama sebagai pemicu konflik sosial pada dasarnya terletak bukan pada pengingkaran terhadap ajarannya, melainkan karena praktik agama yang terlalu ketat berdasarkan dogma-dogma ajarannya. Praktik agama yang demikian ketat ini tidak memberi ruang bagi perkembangan paham-paham keagamaan yang berbeda dalam satu agama sehingga tanpa disadari agama telah membentuk umatnya menjadi masyarakat munafik. Dikatakan demikian karena pada satu sisi agama memerintahkan umatnya

melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui dogma dan peribadatan yang ketat. Sebaliknya, pada sisi lain sebagai akibat dari praktik yang demikian, seolah-olah agama memaksa umatnya untuk tidak peduli terhadap kehidupan sosial karena kehidupan akhirat jauh lebih penting daripada kehidupan di dunia ini.

Wajah ganda agama ini menurut Nottingham (1992) karena di satu sisi agama bisa merupakan fokus potensial bagi munculnya pembaharuan yang kreatif sekaligus juga kekacauan dalam masyarakat. Kondisi paradoks agama ini, sebagaimana digambarkan Nottingham dan Cassanova tersebut menurut Soemardjo (2003) fenomena agama dalam hidup umat manusia adalah bahwa agama mampu menyatukan manusia, tetapi agama juga dapat memecah belah manusia. Dalam satu agama berbagai bangsa dan kebudayaan dapat disatukan, tetapi dalam agama satu dengan agama yang lain seringkali mengakibatkan perpecahan, pertikaian, bahkan peperangan. Tidak jarang pula terjadi bahwa dalam satu agama, dalam arti berpegang pada satu kitab suci yang sama, karena perbedaan penafsiran mengakibatkan pula perpecahan dan pertikaian. Ini berarti agama, selain dapat menyatukan visi sosial suatu masyarakat, ternyata juga agama berpotensi menjadi pemicu konflik sosial. Konflik sosial ini bukan hanya terjadi dalam hubungan antaragama, tetapi juga dalam satu agama dengan paham keagamaan yang berbeda sehingga konflik internal begitu terbuka dalam setiap agama.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa agama memiliki dua wajah berbeda dan berlawanan, yaitu yang satu menyejukkan dan yang lainnya

menyeramkan. Menyejukkan karena agama mengajarkan kesucian dan penyatuan dengan Tuhan yang ajarannya selalu berisi tema moral dan bertujuan keselamatan. Sebaliknya, menyeramkan karena ketika agama dilepaskan dari intinya dan dipraktikkan hanya sebagai ajaran dan karenanya kurang peduli terhadap dunia kontekstualnya. Agama yang sama ataupun berbeda dalam ukuran kebenaran yang berbeda akan mengalami perbedaan dalam praktiknya, bahkan memiliki implikasi yang berbeda pula.

3. Antara Ortodoksi dan Ortopraksis

Menurut Kahmad (2000) yang mengutip pandangan Glock dan Stark menyebutkan ada lima dimensi agama. *Pertama*, dimensi keyakinan. Dimensi ini berisikan pengharapan sambil berpegang teguh pada teologis tertentu. *Kedua*, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. *Ketiga*, dimensi pengalaman keagamaan yang merujuk pada seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. *Keempat*, dimensi pengetahuan agama, artinya orang beragama memiliki pengetahuan tentang keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi. *Kelima*, dimensi konsekuensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

Sementara itu ahli lainnya, seperti Mukti Ali (1998) berpandangan bahwa antara agama dan masyarakat terjalin hubungan yang bersifat saling mempengaruhi. Agama menjadi bagian integral kehidupan masyarakat di mana agama itu diterima menjadi sistem

keyakinan dari seluruh tindakan. Dalam hal ini agama diterima menjadi inti nilai dari sistem sosial dalam masyarakat tersebut sehingga agama menjadi landasan ideal yang mewarnai keseluruhan sistem norma yang berlaku. Agama sungguh-sungguh berhimpit dengan kehidupan sosial, bahkan di antara keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan secara tegas dalam praktiknya.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa sistem keyakinan sebuah agama tidak bersifat steril, tetapi dia dipengaruhi oleh unsur-unsur lain di luar dirinya. Selain dibentuk oleh substansi ajarannya, maka ia juga akan dipengaruhi oleh sistem dan struktur sosial di mana agama tersebut dimanifestasikan oleh pemeluknya. Artinya, bahwa agama dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat pemeluknya, tetapi di sisi lain agama juga bisa menjadi pengendali sosial masyarakat pemeluknya.

Terkait dengan kondisi tersebut dalam hal ini fungsi agama adalah menyediakan dua hal. *Pertama*, memberikan suatu cakrawala pandang tentang dunia luar yang tak terjangkau oleh manusia, dalam arti di mana deprivasi dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. *Kedua*, menyediakan sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia mempertahankan moralnya. Menjadi lebih jelas bahwa agama dapat memberikan perluasan pandangan dan menjadi jaminan moral bagi manusia melalui berbagai upacara agama. Memperluas pandangan yang melampaui batas kemampuan inderawi melalui

pencapaian makna-makna kehidupan dan menjadi jaminan moral karena agama lebih menekankan pada disiplin tindakan daripada sekadar menghafal ajaran agama. Agama turut serta membangun dan mengembangkan moral masyarakat, yakni fondasi penting bagi konstruksi sosial suatu masyarakat manusia.

Dalam kenyataan masyarakat sekarang cenderung menjadi mudah tersinggung, cepat marah, sering melakukan tindakan anarkis, dan segala jenis tindakan destruktif lainnya, sehingga muncul pertanyaan apakah ajaran agama sudah merasuk dalam jiwa dan berdaya guna bagi masyarakat? Lebih disesalkan lagi tindakan anarkis dan destruktif itu dilakukan dengan mengusung nama agama. Menurut Supono (2003) seakan ada dua lapis peran agama dalam kehidupan masyarakat. *Pertama*, tampak agama sebagai institusi yang mengajarkan segala kebajikan hidup, sementara pada lapis *kedua*, agama bergulat dengan urusan praksis hidup yang terkadang jauh dari cita-cita dan tujuan agama. Di sinilah terjadi ketegangan antara ortodoksi dengan ortopraksis dan di sinilah peran para tokoh agama menjadi sangat dominan dalam memberikan tafsir terhadap teks-teks agama sehingga agama menjadi lebih fungsional dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain kuncinya ada pada persoalan hermeneutik. Penafsiran terhadap teks agama harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan di samping persoalan akhirat. Pada dasarnya tujuan diturunkannya ayat-ayat suci agama adalah untuk menuntun hidup manusia sehingga menjadi lebih bermartabat dan lebih humanis.

4. Narsisme Agama

Agama dan kebudayaan memang dua ranah yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang sangat mendalam. Agama secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Sementara itu kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. Dari batasan ini dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu dimiliki oleh individu warga masyarakat atau warga satu kesatuan sosial, tetapi karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, maka kebudayaan yang dimiliki oleh individu-individu sebetulnya pada prinsipnya juga dimiliki bersama oleh individu-individu yang menjadi warga suatu masyarakat (Suparlan, 1981/1982:80). Sementara itu menurut Bakker (1984:48) kebudayaan dan agama memang berbeda, tetapi keduanya bisa bersifat komplementer. Agama, yang terdiri dari ajaran, peraturan dan upacara-upacara yang menjawab semua tuntutan zaman, banyak terdapat unsur-unsur kebudayaan. Sebaliknya banyak prestasi yang dicapai dalam bidang kebudayaan tak akan pernah terjadi seumpamanya tidak diilhami oleh jiwa agama.

Dari paparan ini dapat ditarik benang merah antara agama dan kebudayaan sebenarnya sama-sama berada dalam tataran ide manusia dalam menata perilakunya menuju keteraturan.

Ajaran agama dapat diterima dan menjadi sebagian dari model-model pengetahuan yang ada dalam kebudayaan; dan bahkan dalam beberapa kebudayaan, ajaran agamalah yang terutama menjadi model pengetahuan yang dijadikan pegangan dalam memahami dan menanggapi lingkungan yang dihadapi serta bagi perwujudan kelakuan dan tindakannya (Suparlan, 1981/1982:86).

Agama dalam praksis tampil dalam bentuk kebudayaan yang dijiwai agama dari komunitas pendukung agama. Di satu sisi hal ini akan memberi peluang bagi munculnya berbagai kreativitas budaya bernuansa agama, sementara di sisi lainnya menyebabkan terjadi eksklusivisme agama. Agama seakan didorong untuk menampilkan diri seindah mungkin atau paling tidak berusaha menciptakan identitas-identitas khusus bagi pemeluknya sehingga tampil beda dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Eksklusivisme agama cenderung mendorong para pemeluk agama lebih menonjolkan "kemasan emosional keagamaan" dari pada kedalaman ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan. Kondisi seperti ini memberi peluang besar bagi munculnya narsisme agama. Narsisme adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Sifat ini dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Dimilikinya sifat narsisme dalam jumlah yang cukup akan membuat seseorang memiliki persepsi yang seimbang antara kebutuhannya dalam hubungannya dengan orang lain. Narsisme memiliki sebuah peranan yang sehat dalam artian membiasakan seseorang untuk berhenti bergantung pada standar dan prestasi orang lain demi membuat dirinya bahagia. Namun apabila jumlahnya berlebihan,

dapat menjadi suatu kelainan kepribadian yang bersifat patologis (Utama, 2011).

Narsisme agama dapat mendorong terjadinya hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, narsisme agama menjadi orang atau sekelompok orang untuk mementingkan agamanya sendiri, memandang agamanyalah yang paling unggul. *Kedua*, bersikap egois dan selalu mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. *Ketiga*, tidak memiliki perasaan empati terhadap orang lain. *Keempat*, selalu merasa iri hati dengan keberhasilan orang lain. *Kelima*, arogan dan merendahkan agama orang lain. Harus diingat bahwa ketika muncul gejala-gejala berikut maka agama yang secara fungsional memberikan perlindungan dan rasa aman akan berubah menjadi sebuah bencana kemanusiaan manakala: *Pertama*, bila suatu agama mengklaim kebenaran agamanya sebagai kebenaran yang mutlak dan satu-satunya. *Kedua*, bila muncul ketaatan buta kepada pemimpin keagamaan. *Ketiga*, ketika agama gandrung merindukan zaman ideal, lalu bertekad merealisasikan zaman tersebut ke dalam zaman sekarang. Tanda *keempat* adalah apabila agama membenarkan dan membiarkan terjadinya "tujuan yang membenarkan cara"; sementara tanda *kelima*, adalah ketika agama tak segan-segan memekikkan perang suci (Kimbal, 2002).

Dari paparan di atas jelas bahwa narsisme agama mengarah pada terjadinya konflik agama. Oleh karenanya umat manusia semestinya selalu berusaha untuk menjaga agar agama selalu menjadi pengayom bagi terciptanya kedamaian di dunia, dengan selalu menjaga eksistensi moralnya.

C. PENUTUP

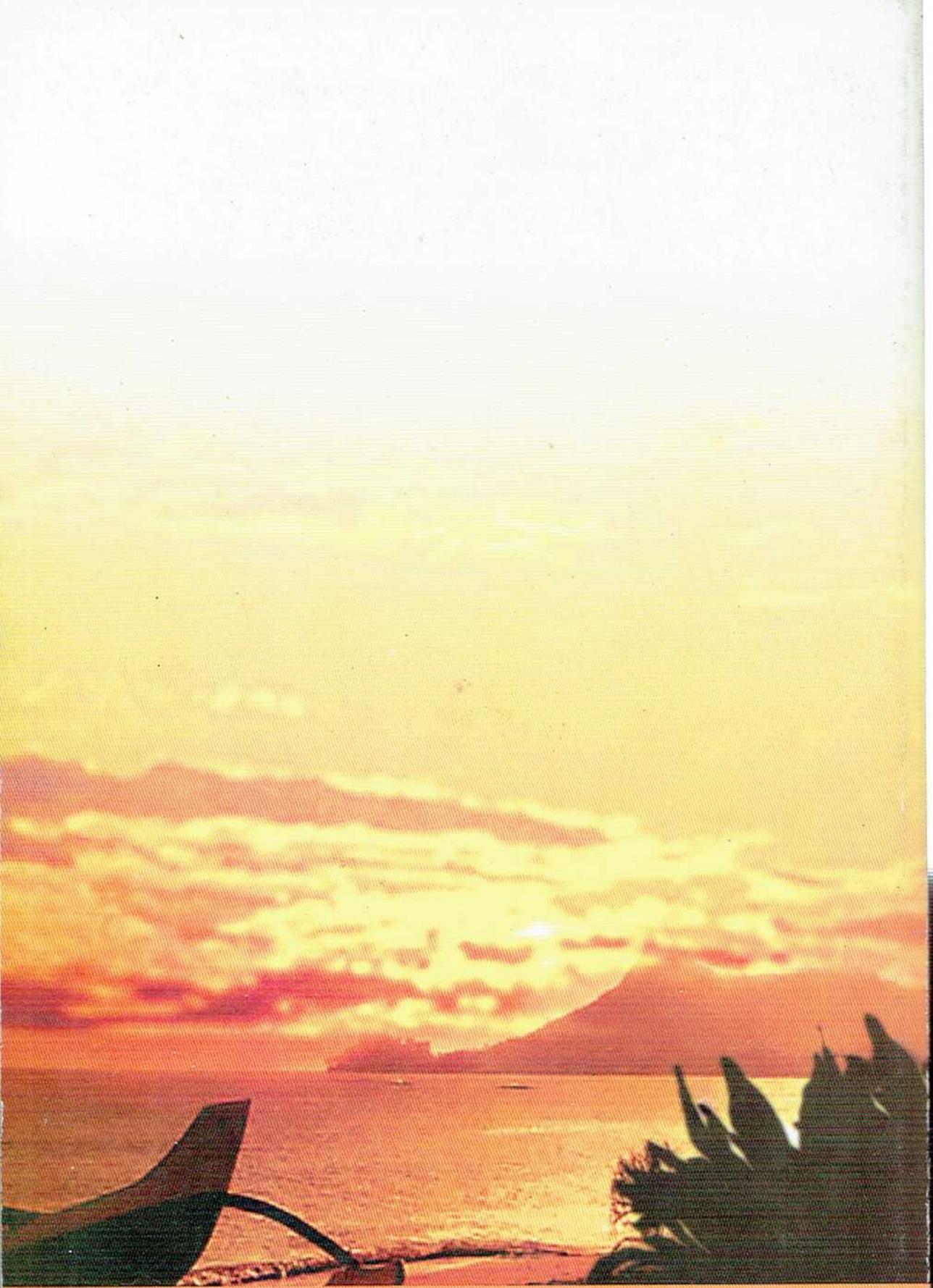
Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya konflik agama adalah (1) pemanfaatan agama sebagai alat kekuasaan untuk menekan lawan-lawan politik, (2) wajah ganda agama, disatu sisi agama bisa menjadi pemersatu sekaligus pula sebagai alat pemecah belah, (3) persolan semiotik atau penafsiran terhadap teks agama, (4) narsisme agama.

Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat plural atau multikultur sebaiknya telah ditanamkan sejak kanak-kanak sehingga terbiasa menghargai keragaman dan keanekaan budaya, sehingga menumbuhkan sikap dilaogis dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ali, Mukti. 1998. *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.
- Casanova, Jose. 2003. *Agama Publik Di Dunia Modern: Public Religion in the Modern World*. Surabaya: Pustaka Eureka; Malang: ReSIST, dan Yogyakarta: LPIP.
- Galtung, Johan. 2002. *Kekerasan Budaya*, dalam *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Kerjasama PT Ghalia dengan Universitas Kristen Petra.
- Halim, Fachrizal.A. 2002. *Beragama dalam Belunggu Kapitalisme*. Magelang : Indonesiatera.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat. Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2007. *Humanisasi Politik dan Keagamaan: Perspektif Islam dalam Agama dan Negara*. Yogyakarta: Institut Dian/ Interfidei
- Nottingham, Elizabeth K. 1992. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rey, Terry. 2007. *Bourdieu on Religion. Imposing Faith and Legitimacy*. London: Equinox.
- Robertson, Roland. 1986. *Sosiologi Agama*. Aksara Persada Offset.
- Santoso, Thomas. 2002. *Kekuasaan dan Kekerasan, dalam Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Kerjasama PT Ghalia dengan Universitas Kristen Petra.
- Sumardjo, Jakob. 2003. *Mencari Sukma Indonesia. Pendataan Kesadaran Keindonesiaan di Tengah Letupan Disintegrasi Sosial Kebangsaan*. Yogyakarta: AK Group.
- Sura, I Gede, dkk. 2002. *Kajian Naskah Lontar Siwagama*. Denpasar : Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Utama, I Wayan Budi. 2011. *Narsisme dan Konflik Agama dalam Dharma Smrthi*, *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* Vol IX April 2011. Denpasar : Pascasarjana UNHI.



ISSN 1410-5195



1 214105 195083